

Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah pelaksanaan pekerjaan survey “Tingkat pengetahuan politik masyarakat Kota Mojokerto tentang Pemilihan Umum (Pemilu)” sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Semua ini tidak lepas dari kerjasama tim survey, baik pekerjaan lapangan, input data hingga penulisan yang sesuai denganjadwal.

Ada empat tahapan penting dalam pelaksanaan survey ini. Pertama penyusunan disain dan instrumenn. Kedua, penyebaran instrumen dan pengumpulannya. Ketiga, input dan analisis data. Keempat penulisan dan cetak laporan.

Kegiatan riset dengan menggunakan teknik survey jangan diasumsikan sebagaimana survey yang dikenal luas di masyarakat terutama pada saat menjelang atau pasca perhelatan Pilpres, Pilkada maupun Pileg. Dimana kegiatan tersebut dilaksanakan dengan laporan yang sederhana dan tidak memerlukan tingkat ketelitian penulisan laporan. Sementara dalam survey akademik semacam ini memerlukan waktu, perhatian dan tingkat kesulitan yang berbeda. Karena dihadapkan oleh kajian akademik yang tuntas, begitu pula cara penyajian dan penulisannya. Sehingga laporan yang dihadirkan seperti laporan akademik umumnya, sebagaimana penulisan Skripsi, Tesis hingga Disertasi.

Atas semua persoalan tersebut, peneliti melaluinya dengan senang hati, tanpa mempertimbangkan seberapa besar *reward* yang diterima. Karena bagaimanapun peneliti berharap melalui riset ini, demokrasi Indonesia akan berjalan semakin baik, terutama melalui regulator KPU di semua tingkatan.

Selamat menikmati hasil survey dan kajian ini.

Mojokerto, 5 Juli 2015

Konsultan

Dr. Abdul Chalik

DAFTAR ISI

Cover dalam

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Tujuan
- D. Out put dan Manfaat
- E. Metode penelitian
- F. Sistematika Pembahasan

Bab II Kajian Tentang Melek Politik Masyarakat

- A. Pendidikan politik
- B. Budaya politik
- C. Hubungan pendidikan dan budaya politik dengan melek politik

Bab III Penyajian dan Analisis Data

- A. Penyajian Data
 - 1. Gambaran umum lokasi penelitian
 - a. Gambaran geografis Kota Mojokerto
 - b. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu
 - c. Gambaran sampel penelitian
 - 2. Pengetahuan tentang Pemilu
 - 3. Pengetahuan tentang Calon yang dipilih dalam Pemilu
 - 4. Pengetahuan tentang tata cara mencoblos
- B. Temuan dan Analisis

Bab IV Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan elemen penting dalam demokrasi. Pemilu merupakan alat untuk mencapai cita-cita demokrasi, yakni adanya keterwakilan masyarakat dalam sistem pemerintahan yang dilakukan secara legal berdasarkan undang-undang. Dalam Negara yang demokratis, maka semua suksesi dilakukan melalui cara Pemilu. Demikian pula yang terjadi di Indonesia.

Baru saja pada tahun 2014, Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD hingga Presiden. Belum lepas tenaga dan pikiran berurusan dengan Pemilu 2014, bangsa ini akan segera berhadapan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dihelat pada akhir tahun 2015 ini.

Tahun 2015 merupakan tahun dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di Jawa Timur. Setidaknya terdapat 16 Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan hajatan politik lima tahunan ini. Namun ada beberapa Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pilkada pada tahun 2017 dan 2018.

Isu utama dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia terkait dengan partisipasi politik yang mengalami naik turun. Yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah aktifitas yang dilakukan oleh individu warga Negara untuk mempengaruhi pilihan orang untuk posisi pemerintahan dan/atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan mereka sebagai pejabat pemerintah.¹ Partisipasi dalam arti yang sederhana adalah ikut Pemilu (voter turnout) dan ikut serta dalam kampanye-kampanye Pemilu, aksi damai maupun aksi dengan menggunakan kekerasan.²

Partisipasi politik memilih mengalami pasang surut sejak Pemilu pertama kali tahun 1955. Partisipasi tertinggi pada tahun 1993 yang mencapai 93 %, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Pemilu 1955 yang mencapai 87 %. Kemudian mengalami penurunan pada Pemilu 2004 yang mencapai angka 84, 9 %, dan Pemilu 2009 turun drastis mencapai 70,99 %.³ Sementara pada Pemilu 2014 merupakan titik nadir terendah yang mencapai 70, 2 % atau setara dengan angka Golput yang mencapai 29, 8 %.

Namun demikian, kondisi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden berbeda dengan Pemilihan Kepala Daerah, baik Gubernur/Wagub maupun Bupati/Wabup dan Wali Kota/Wawali. Tingkat partisipasi Pemilu dalam menentukan Kepala Daerah lebih tinggi dibandingkan dengan Pileg atau Pilpres. Hal tersebut dapat dimaklumi karena muncul anggapan bahwa Pilkada berkaitan secara langsung dengan kepentingan masyarakat.

Secara normatif dan empiris, berbagai alasan yang menjadi penyebab ketidakaktifan masyarakat dalam Pemilu. Salah satunya adalah tingkat

¹ Michael Rush, Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, ter. (Jakarta:Raja Grafindo Persada), 121.

² Saiful Mujani, R. William Liddle, Kuskrido Ambardi, *Kuasa rakyat* (Jakarta:Mizan, 2011), 81.

³ Ibid. 89.

pengetahuan masyarakat terhadap Pemilu yang cukup rendah. Dimana Pemilu dipandang sebagai kegiatan rutinitas yang tidak akan banyak memberikan dampak pada perubahan masyarakat. Pemilu dipandang sebagai kegiatan pemerintah atau perorangan yang punya kepentingan langsung dengan urusan Pemilu, bukan kegiatan secara bersama.

Apapun hasilnya, hasil Pemilu nasional maupun Pilkada sangat menentukan terhadap nasib bangsa dan merupakan cermin dari kemajuan berdemokrasi. Tingkat partisipasi yang tinggi merupakan bentuk dari respon dan perhatian masyarakat terhadap politik dan demokrasi, meskipun tidak serta merta dikatakan bahwa tingginya partisipasi tidak berbanding lurus dengan tingkat kemajuan suatu bangsa.

Survey ini dimaksudkan untuk memetakan dari awal partisipasi politik masyarakat terutama Kota Mojokerto yang diukur dari tingkat pengetahuan masyarakat terhadap politik. Hasil penelitian diharapkan dapat menggambarkan tentang pengetahuan masyarakat terhadap Pemilihan Umum.

B. Permasalahan

Permasalahan penelitian ini adalah; (1) Bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat tentang Pemilu; (2) Apa yang menjadi dasar dan faktor terbentuknya pengetahuan masyarakat tentang Pemilu

C. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai adalah (1) Untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang Pemilu; (2) Untuk mengetahui dasar dan faktor terbentuknya pengetahuan masyarakat tentang Pemilu

D. Out Put dan Manfaat

Adapun manfaat dan out put yang diharapkan adalah :

1. Tersedianya dokumen akademik kajian pengetahuan masyarakat tentang Pemilu dari sudut pandang masyarakat berupa tingkat pengetahuan, dasar dan faktor terbentuknya pengetahuan serta tingkat partisipasi masyarakat.
2. Dokumen akademik selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar dan alat dalam menentukan kebijakan strategis di bidang Kepemiluan, baik oleh KPU, KPU Propinsi dan Kabupaten/Kota terutama KPU Kota Mojokerto.

E. Kajian Konsep

Dalam demokrasi modern, pengetahuan (melek) terhadap politik merupakan keniscayaan. Masyarakat dituntut untuk mengenal lebih mendalam tentang arti pentingnya sebuah politik, partai politik, politik kenegaraan, kebangsaan, kebirokrasian dan politik dalam arti yang sangat luas. Masyarakat yang berada di suatu Negara, harus memahami tugas dan fungsinya, sehingga ada hubungan timbal balik antara masyarakat dengan aparatur negara.

Partisipasi merupakan salah satu bentuk dari meleak politik masyarakat, yakni ketika secara langsung maupun tidak langsung mengambil peran dalam perjalanan suatu bangsa dan negara. Partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri dan sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa.

Definisi partisipasi politik yang cukup senada disampaikan oleh Silvia Bolgherini. Menurut Bolgherini, partisipasi politik " ... *a series of activities related to political life, aimed at influencing public decisions in a more or less direct way—legal, conventional, pacific, or contentious.*⁴ Bagi Bolgherini, partisipasi politik adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan politik, yang ditujukan untuk memengaruhi pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung -- dengan cara legal, konvensional, dan damai.

Partisipasi politik merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai warga Negara yang baik (*good citizen*) dalam ikut serta menentukan arah bangsa dan negara. Salah satu bentuk partisipasi tersebut adalah ikut serta dalam Kepemiluan, baik Pileg, Pilpres, maupun Pilkada.

Salah satu yang membentuk partisipasi politik adalah tingkat kesadaran masyarakat terhadap politik. Kesadaran dibentuk oleh tingkat pengetahuan mereka terhadap pentingnya politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semakin tinggi tingkat pengetahuan masyarakat terhadap politik, maka semakin tinggi pula kesadaran mereka terhadap politik. Namun demikian bukan berarti tingkat pengetahuan berbanding lurus dengan kehadiran dalam pemilihan umum, atau partisipasi melalui media *on line*. Kesadaran dalam pengertian di atas berarti kesadaran terhadap tanggung jawabnya sebagai warga Negara.

Pengetahuan terhadap politik ditandai dengan pengetahuan terhadap politik representasi dan arti penting seorang pemimpin yang dipilih secara demokratis. Demikian pula pengetahuan politik terkait dengan kemampuan, kemauan dan kesempatan dalam mengakses informasi dalam aktifitas politik.

Dalam proses dan aktifitas politik yang menyangkut kepentingan bernegara, informasi disediakan oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam konteks Indonesia, terdapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai tingkat pusat hingga Kabupaten/Kota. Lembaga ini

⁴ Silvia Bolgherini, "Participation" dalam Mauro Calise and Theodore J. Lowi, *Hyperpolitics: An Interactive Dictionary of Political Science Concept* (Chicago: The University of Chicago, 2010), 169.

yang menjadi regulator, operator penyelenggaraan Pemilu, termasuk di dalamnya menyampaikan informasi kepada masyarakat. Lembaga ini menjadi sangat vital dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

F. Metode penelitian

1. *Pendekatan penelitian.* Penelitian akan menggunakan metode kuantitatif berupa generalisasi atas asumsi umum yang dituangkan dalam pilihan kuesioner/angket.
2. *Sampel dan teknik sampling.* Penelitian ini akan dilakukan di semua kecamatan (dua kecamatan) di wilayah Kota Mojokerto. Teknik pengambilan sampel menggunakan *multistage random sampling*, yakni teknik pengambilan sampel dengan cara mengambil keterwakilan semua sampel penelitian berdasarkan umur secara acak. Dengan prosentase sampel; 17-25 tahun/pemilih pemula: 25 %, pemilih 26-40 tahun: 30 % dan di atas 40 tahun: 40 %.
3. *Analisis data.* Semua data akan ditabulasi dan dianalisis menggunakan SPSS 17.0 dan selanjutnya akan dilakukan interpretasi. Untuk menganalisis tingkat pengetahuan masyarakat tentang Pemilu, maka akan digunakan alat ukur sebagai berikut :

SCORE/%	KATAGORI
91-100	Sangat Tinggi/Sangat baik
80 - 91	Tinggi/baik
69 - 79	Sedang/Cukup
59 - 68	Rendah
< 59	Sangat rendah

G. Sistematika Pelaporan

Pada bagian awal akan diuraikan tentang latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan dan manfaat, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Pada bagian kedua akan dijelaskan tentang teori-teori yang akan diuji serta penjelasannya.

Pada bagian ketiga akan diuraikan tentang penyajian data, temuan dan analisis.

Pada bagian keempat kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

KAJIAN TENTANG PENDIDIKAN DAN BUDAYA

POLITIK DI INDONESIA

Kajian tentang melek politik tidak dapat dilepaskan dari persoalan pendidikan politik dan budaya politik. Kedua aspek tersebut sangat menentukan terhadap pemahaman dan kematangan setiap warga Negara dalam berpolitik. Begitu pula, dapat berdampak pada partisipasi atau keikutsertaan dalam politik.

A. Pendidikan Politik

Istilah pendidikan politik dalam Bahasa Inggris sering disamakan dengan istilah *political socialization*. Istilah *political socialization* jika diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia akan bermakna sosialisasi politik. Oleh karena itu, dengan menggunakan istilah *political socialization* banyak yang mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah Sosialisasi Politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit.

Menurut Ramlan Surbakti, dalam memberikan pengertian tentang pendidikan politik harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai sosialisasi politik. Surbakti (1999:117) berpendapat bahwa:

Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.

Pendapat di atas secara tersirat menyatakan bahwa pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik. Pendidikan politik mengajarkan masyarakat untuk lebih mengenal sistem politik negaranya. Dapat dikatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

Kedua pendapat di atas mengungkapkan bahwa pendidikan politik adalah suatu bentuk pendidikan yang dijalankan secara terencana dan disengaja baik dalam bentuk formal maupun informal yang mencoba untuk mengajarkan kepada setiap individu agar sikap dan perbuatannya dapat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku secara sosial. Dalam hal ini dapat terlihat bahwa pendidikan politik tidak hanya mempelajari sikap dan tingkah laku individu. Namun pendidikan politik mencoba untuk mengaitkan sikap dan tingkah laku individu tersebut dengan stabilitas dan eksistensi sistem politik.

Kartini Kartono (1990:vii) memberikan pendapatnya tentang hubungan antara pendidikan dengan politik yaitu "pendidikan dilihat sebagai faktor politik dan kekuatan politik. Sebabnya, pendidikan dan sekolah pada

hakekatnya juga merupakan pencerminan dari kekuatan-kekuatan sosial-politik yang tengah berkuasa, dan merupakan refleksi dari orde penguasa yang ada".

Berdasarkan pendapat di atas, dapat kita ketahui bahwa pendidikan dan politik adalah dua unsur yang saling mempengaruhi. Pengembangan sistem pendidikan harus selalu berada dalam kerangka sistem politik yang sedang dijalankan oleh pemerintahan masa itu. Oleh karena itu segala permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan akan berubah menjadi permasalahan politik pada saat pemerintah dilibatkan untuk memecahkannya.

Fungsi pendidikan politik sangat penting sebab pendidikan politik meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik yang pada gilirannya akan mendorong timbulnya kesadaran politik secara maksimal dalam suatu sistem politik.

Merujuk pada beberapa pengertian pendidikan politik yang telah disebutkan sebelumnya, maka pendidikan politik mempunyai dua tujuan utama. *Pertama*, fungsi pendidikan politik adalah untuk mengubah dan membentuk tata perilaku seseorang agar sesuai dengan tujuan politik yang dapat menjadikan setiap individu sebagai partisipan politik yang bertanggung jawab. *Kedua*, fungsi pendidikan politik dalam arti yang lebih luas untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang sesuai dengan tuntutan politik yang ingin diterapkan.

Inti dari pendidikan politik adalah mengenai bagaimana rakyat direkrut dan disosialisasikan. Jadi, fungsi dari pendidikan politik adalah untuk menjelaskan proses perekrutan dan upaya sosialisasi kepada rakyat untuk mengerti mengenai peranannya dalam sistem politik serta agar dapat memiliki orientasi kepada sistem politik.

Fungsi yang disampaikan di atas lebih menonjolkan fungsi pendidikan politik dalam mengubah tatanan masyarakat yang ada menjadi lebih baik dan lebih mendukung tercapainya proses demokrasi. Sedangkan fungsi pendidikan politik bagi individu antara lain adalah:

Pertama, peningkatan kemampuan individual supaya setiap orang mampu berpacu dalam lalu lintas kemasyarakatan yang menjadi semakin padat penuh sesak dan terpolusi oleh dampak bermacam-macam penyakit social dan kedurjanaan.

Kedua, di samping mengenai kekuasaan, memahami mekanismenya, ikut mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan di tengah masyarakat.

Fungsi pendidikan politik bagi individu yang tertera di atas tidak hanya mengubah individu tapi juga membentuk individu yang baru. Dalam artian bahwa seseorang individu dengan melalui pendidikan politik tidak hanya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang politik tapi juga mempunyai kesadaran dan sensitifitas dalam berpolitik yang direalisasikan dalam bentuk perbuatan yaitu dengan ikut berpartisipasi atau ditunjukkan dengan sikap dan perilaku politif yang lebih luas dalam usahanya untuk mencapai tujuan politik.

Tujuan diadakannya pendidikan politik secara formal terdapat dalam Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang menyatakan bahwa: Tujuan pendidikan politik adalah memberikan

pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Berdasarkan pemaparan tentang tujuan pendidikan politik di atas, penulis berpendapat bahwa yang menjadi tujuan utama dari pendidikan politik adalah agar generasi muda saat ini memiliki kemampuan untuk memahami situasi sosial politik penuh konflik. Aktifitas yang dilakukan pun diarahkan pada proses demokratisasi serta berani bersikap kritis terhadap kondisi masyarakat di lingkungannya. Pendidikan politik mengajarkan mereka untuk mampu mengembangkan semua bakat dan kemampuannya aspek kognitif wawasan kritis, sikap positif, dan keterampilan politik. Kesemua itu dirancang agar mereka dapat mengaktualisasikan diri dengan jalan ikut berpartisipasi secara aktif dalam bidang politik.

Dari tujuan pendidikan politik di atas, dapat dilihat bahwa antara tujuan pendidikan politik dengan fungsi yang dimilikinya hampir sama. Tercapainya fungsi dan tujuan pendidikan politik merupakan keberhasilan dari diadakannya pendidikan politik itu sendiri.

Pendidikan politik dapat dikatakan sebagai media penyampaian konsep politik yang memiliki tujuan akhir untuk membuat warga negara menjadi lebih melek politik. Warga negara yang melek politik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban sehingga dapat ikut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam setiap proses pembangunan. Pendidikan politik diperlukan keberadaannya terutama untuk mendidik generasi muda saat ini yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa.

Eksistensi pendidikan politik di sini adalah sebagai tongkat estafet kepada generasi selanjutnya dalam memahami konsep-konsep politik kenegaraan. Fungsi pendidikan politik yang paling periling adalah sebagai penyaring (*filter*) terhadap berbagai pemikiran baru, ideologi baru, dan berbagai ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

B. Budaya Politik

Budaya politik merupakan pendekatan yang cukup akhir di dalam ilmu politik. Pendekatan ini lahir setelah tuntasnya penelitian yang dilakukan oleh dua peneliti Amerika Serikat, yaitu Gabriel A. Almond dan Sidney Verba. Hasil penelitian tersebut dituangkan di dalam buku mereka yang berjudul Budaya Politik, yang merupakan hasil kajian antara tahun 1969 sampai dengan 1970 atas 5.000 responden yang tersebar di lima negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Italia, Meksiko, dan Jerman Barat.

Budaya politik merupakan perwujudan nilai-nilai politik yang dianut oleh sekelompok masyarakat, bangsa, atau negara yang diyakini sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas politik kenegaraan.

Gabriel A. Almond dan Sidney Verba. Kedua ahli ini mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dengan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu (1963: 13).

Adapun Rusadi menyatakan bahwa budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik (1988: 25).

Lebih jauh lagi Almond dan Powell menyatakan bahwa orientasi seseorang terhadap sistem politik dapat dilihat dari tiga komponen, yaitu orientasi kognitif, afektif, dan evaluative

Orientasi kognitif. Orientasi kognitif meliputi berbagai pengetahuan dan keyakinan tentang sistem politik. Contoh yang berkaitan dengan aspek pengetahuan misalnya tingkat pengetahuan seseorang mengenai jalannya sistem politik, tokoh-tokoh pemerintahan, kebijakan yang mereka ambil atau simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya secara keseluruhan seperti ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas negara, mata uang, dan lain-lain.

Orientasi afektif. Orientasi afektif menunjuk pada aspek perasaan atau ikatan emosional seseorang terhadap sistem politik. Seseorang mungkin memiliki perasaan khusus terhadap aspek-aspek sistem politik tertentu yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu secara keseluruhan. Dalam hal ini, sikap-sikap yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam keluarga atau lingkungan hidup seseorang umumnya cenderung berpengaruh terhadap pembentukan perasaan seseorang tersebut.

Orientasi evaluatif. Orientasi evaluatif berkaitan dengan penilaian moral seseorang terhadap sistem politik. Selain itu, orientasi ini juga menunjuk pada komitmen terhadap nilai-nilai dan pertimbangan-pertimbangan politik (dengan menggunakan informasi dan perasaan) tentang kinerja sistem politik. Dalam hal ini, norma-norma yang dianut dan disepakati bersama menjadi dasar sikap dan penilaiannya terhadap sistem politik.

Salah satu karakteristik budaya politik yang dialami di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah patrimonialisme. Dalam budaya politik semacam ini, pola kekuasaan berjalan di atas prinsip relasi kuasa antara penguasa sebagai patron (baca: pengayom, pelindung atau penjamin kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan) dan rakyat sebagai obyek yang dilindungi, diayomi dan dijamin kenyamanan, keamanan dan kesejahteraannya. Menurut Max Weber, patrimonialisme merupakan pola relasi kekuasaan tradisional antara seorang patron dan client, di mana "obyek ketaatan terhadap otoritas pribadi yang dia nikmati berpijak pada status tradisional.

Kelompok organisasi yang menjalankan otoritas, dalam kasus yang paling sederhana, terutama berdasar pada hubungan loyalitas individu, yang dikembangkan melalui proses pendidikan. Individu yang menjalankan otoritas bukanlah orang yang 'hebat', tetapi seorang 'pemimpin'. Staf administratifnya tidak terdiri dari para pegawai, tetapi pelatih pribadi.... Apa yang menentukan hubungan staf administratif dengan pemimpin bukanlah

kewajiban kantor yang bersifat impersonal, tetapi loyalitas individu kepada sang pemimpin.”

Indonesia, sebagai negara berkembang, memiliki akar sejarah patrimonialisme yang cukup kuat, yang oleh David Brown disebut sebagai “neo-patrimonialisme.” Kekuasaan neo-patrimonialisme dicirikan oleh ikatan personal antara pimpinan dan anggota organisasi atau lembaga yang dipimpin, bukan ikatan struktural-organisasional. Pola relasi dalam lembaga semacam ini lebih banyak bekerja berdasar atas kesetiaan personal para anggota organisasi, dan bukan kesetiaan terhadap lembaga itu sendiri. Akibatnya, kinerja seorang pegawai di sebuah lembaga sangat ditentukan oleh figur-figur pimpinannya, bukan atas dasar kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai staf.

Korupsi yang merajalela merupakan manifestasi utama nilai dan praktik budaya politik patrimonial yang telah berurat berakar dalam struktur kesadaran masyarakat Indonesia. Pemerintahan patrimonial, dalam definisi klasik Max Weber, tidak mengenal pemisahan birokratis antara wilayah “private” dan “official”. Penguasa patrimonial mengeksploitasi kekuasaannya seolah-olah ia adalah “hak milik pribadi”, yang tidak dibatasi oleh norma dan peraturan hukum. Kantor dan kegiatan otoritas publik melayani penguasa dan pegawainya, mereka tidak melayani tujuan-tujuan yang impersonal. Praktik patrimonialisme adalah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan atau, dalam bahasa sederhananya, korupsi.

Kerajaan Jawa tradisional yang ada sebelum Belanda menjajah kepulauan Indonesia yang diperintah atas dasar patrimonialisme ala Weber. Para penguasa Jawa memperoleh kesetiaan dari para pegawainya dengan memberi mereka hak atas penghasilan dari tanah yang bisa dieksploitasi secara komersial, tetapi tidak untuk dijual atau dimiliki. Menurut Anderson, patrimonialisme muncul kembali di Indonesia karena ia adalah gaya pemerintahan tradisional pada masa pra-kolonial dan karena juga, dalam kekacauan ekonomi tahun 1950an, birokrasi rasional-legal yang diwariskan oleh Belanda terbukti tidak mampu bertahan secara ekonomi.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, pola pemerintahan patrimonialisme mewujud dalam bentuk pemerintahan yang sentralistik dengan sejumlah sayap kelembagaan yang berfungsi sebagai “pengayom” bagi kepentingan masyarakat, namun dengan imbalan kekuasaan atau sumber daya material bagi para pemangku kekuasaan. Istilah “pamong praja” dalam sistem pemerintahan Orde Baru menggambarkan betapa pejabat diasumsikan memiliki fungsi kepengayoman kepada masyarakat luas, namun fungsi tersebut tidak gratis. Di samping menyerahkan loyalitas, masyarakat yang diayomi harus memberikan sejumlah imbalan tertentu sebagai balas budi mereka atas kenyamanan hidup yang sudah dinikmati mereka. Dari sinilah praktik pungutan (liar), pemerasan, percaloan politik, dan semacamnya menemukan akarnya, karena berbagai kenyamanan dan kemudahan yang dinikmati oleh rakyat dikonstruksikan sebagai “tetesan rejeki” (trickle-down effect) dari atas, bukan karena hak yang melekat pada tiap-tiap individu.

Sistem relasi dalam kekuasaan semacam ini seringkali disebut sebagai pola relasi patron-client, di mana seorang pemimpin diperlakukan sebagai patron, pelindung atau penjamin kenyamanan hidup bagi anggota masyarakat yang dipimpinnya. Sementara itu, masyarakat menempati peran sebagai client, di mana isu-isu terkait kesejahteraan dan kemalangan sosial berada di tangan sang pemimpin atau patron. Pola relasi semacam ini pada umumnya berkembang baik di sejumlah negara yang memiliki sejarah kerajaan yang kuat, seperti Indonesia, di mana seorang raja diperlakukan sebagai pihak yang dilayani oleh rakyatnya. Raja juga menjadi pusat dari seluruh rangkaian kekuasaan yang berhak menikmati kesejahteraan akibat dari kekuasaan yang digenggamnya itu.

C. Hubungan Budaya dan Pendidikan Politik dengan Melek Politik

Pengembangan pendidikan politik masyarakat sebagai bagian pendidikan politik yang merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan, guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga merupakan konsep bagian dari proses perubahan kehidupan politik yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif dan efisien.

Oleh karena itu, memilih bukan kesadaran sendiri, tetapi mengikuti pilihan tokohnya. Pendidikan politik ini berfungsi untuk memberikan isi dan arah serta pengertian kepada proses penghayatan nilai-nilai yang sedang berlangsung. Dalam filosofi pendidikan, belajar merupakan sebuah proses panjang seumur hidup artinya pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan.

Pembelajaran pendidikan politik yang berkesinambungan diperlukan mengingat masalah-masalah di bidang politik sangat kompleks dan dinamis. Pendidikan politik bagi generasi muda sejak dini amatlah vital dalam mendukung perbaikan sistem politik di Indonesia.

Pengetahuan sejak dini terhadap komponen-komponen kenegaraan, arti nasionalisme, hak dan kewajiban, sistem pemerintahan, pemilu, dan segala seluk-beluk politik akan melahirkan orang-orang yang berkapasitas dan memiliki arah dalam perbaikan bangsa dan negara. Ketimbang orang-orang yang beranjak dari perut lapar dan modal awal, yang ujung-ujungnya adalah makan sebanyak-banyaknya ketika menjabat.

Sisi lain juga dihadapkan pada budaya politik yang cukup kuat. Di Indonesia, dimana setiap daerah memiliki budaya dan tradisi yang mengakar, memberikan andil pada kehidupan politik masyarakat. Keduanya juga berdampak pada tingkat melek politik masyarakat.

BAB III

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Populasi dan Sampel Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Mojokerto

Wilayah Kota Mojokerto terletak pada ketinggian ± 22 meter dari permukaan laut dan kemiringan tanah 0% - 3%. Dengan demikian dapat diperlihatkan bahwa Kota Mojokerto mempunyai permukaan tanah yang relatif datar, sehingga aliran sungai / saluran menjadi relatif lambat dan hal ini mempercepat terjadinya pendangkalan yang pada akhirnya timbul kecenderungan ada genangan pada berbagai bagian kota apabila terjadi hujan.

Batas Daerah, di sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Brantas, yang membentang memisahkan wilayah Kota dengan Kabupaten. Di sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. Sedangkan di sebelah Barat dan Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Secara Umum, wilayah Kota Mojokerto mempunyai luas wilayah 16,46 km² yang terbagi menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Prajurit Kulon dan Magersari.

Jika dibandingkan, luas wilayah Kecamatan Magersari sedikit lebih luas dibandingkan dengan luas Kecamatan Prajurit Kulon. Kecamatan Prajurit Kulon mempunyai luas wilayah 7,76 km² (47 persen) dan Kecamatan Magersari mempunyai luas wilayah 8,7 km²

Berdasarkan catatan BPS Kota Mojokerto (2013), hasil Registrasi Penduduk Akhir Tahun 2013 mempunyai penduduk sebanyak 136.373 jiwa yang tersebar di 2 (dua) kecamatan dan 18 (delapan belas) kelurahan. Penduduk laki-laki sebanyak 67.528 jiwa atau sebesar 49,52 persen dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak 68.845 atau sebesar 50,48 persen. Dari komposisi penduduk laki-laki dan perempuan itu bisa dilihat bahwa Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Kota Mojokerto adalah sebesar 98,09 persen; artinya di setiap 100 penduduk wanita terdapat 98 penduduk laki-laki.

Dari jumlah penduduk di atas apabila dilihat dari jumlah kelahiran dan kematiannya, jumlah kelahiran pada tahun 2011 sampai 2013 selalu lebih besar dibandingkan jumlah kematian. Demikian halnya dari sisi mutasi penduduk, jumlah penduduk yang datang pada tahun 2011 sampai 2013 selalu lebih besar dibandingkan jumlah penduduk yang pindah.

Pada tahun 2013 jumlah kelahiran sebesar 1.950 jiwa dan jumlah kematian sebesar 1.059 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang datang 3.095 jiwa dan penduduk yang pindah 2.623 jiwa.¹

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu

Partisipasi masyarakat dalam Pemilu dari tahun ke tahun, khususnya para era Reformasi mengalami naik-turun. Partisipasi tertinggi berada pada Pemilu Legislatif yang berada di atas rata-rata nasional, sementara partisipasi terendah terjadi pada Pemilu Gubernur pada tahun 2008 yang hanya 63, 10 %.

Partisipasi tertinggi terjadi pada Pemilu pertama pada era Reformasi tahun 1999 yang mencapai 94, 60 %. Selanjutnya mengalami penurunan, namun masih berada di atas rata-rata nasional. Pada Pemilu 2004 angka partisipasi 86, 93 %, tahun 2009 sebesar 80, 70 % dan pada tahun 2014 yang lalu naik lagi hingga 84 %.

Dalam Pemilu Presiden juga mengalami perkembangan serupa. Pada Pemilu 2004 putaran pertama angka partisipasi mencapai 84, 82 % dan pada putaran kedua turun menjadi 82, 86 %. Sementara pada Pilpres 2009 justru mengalami penurunan hingga mencapai 76, 72 %. Pada Pemilu 2014 yang lalu naik lagi mencapai 81, 66 %.

Berikut ini adalah Tabel partisipasi masyarakat dalam Pileg dan Pilpres:

Tabel 1
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILU LEGISLATIF
DI KOTA MOJOKERTO
Tahun 1999 s/d 2014

NO	TAHUN	JUMLAH PEMILIH (DPT)	TINGKAT KEHADIRAN		PROSENT ASI PARMAS
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	
1.	1999	7.351	65.145	1.407	94,60%
2.	2004 (DPR RI)	83.220	67.309	5.135	86,93%
	(DPD)		58.030	14.084	
	(PROV)		66.327	5.509	
	(KOTA)		67.600	4.739	

¹ BPS, Kota Mojokerto Dalam Angka (Mojokerto:BPS, 2014).

3.	2009 (DPR RI)	89.468	51.805	20.461	80,70%
	(DPD)		41.793	30.473	
	(PROV)		52.650	19.616	
	(KOTA)		67.205	5.061	
4.	2014 (DPR RI)	93.521	59.524	21.059	84,43%
	(DPD)		48.240	32.343	
	(PROV)		60.653	19.930	
	(KOTA)		76.208	4.375	

Tabel 2
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILU PRESIDEN
DI KOTA MOJOKERTO

NO	TAHUN	JUMLAH PEMILIH (DPT)	TINGKAT KEHADIRAN		PROSENTA SI PARMAS
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	
1.	2004 (Put. I)	83.665	69.391	1.575	84,82%
	(Put. II)	83.574	67.337	1.914	82,86%
2.	2009	89.4429	65.984	3.689	76,72%
3.	2014	94.528	74.210	1.122	81,66%

Sementara itu angka partisipasi terendah terjadi pada Pemilihan Gubernur, yakni pada Pilgub 2008 putaran pertama dan kedua dengan angka partisipasi 69, 10 % dan 63, 25 %. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan cukup drastis hingga mencapai 81, 35 %. Namun demikian, angka tersebut masih di atas rata-rata Jawa Timur secara umum.

Angka partisipasi juga mengalami situasi yang sama pada Pilkada tahun 2008 dan 2013. Pada Pilkada 2008 partisipasi masyarakat mencapai 74, 98 %, sementara pada Pilkada 2013 mengalami kenaikan hingga 81, 40 %.²

Berikut ini adalah tabel partisipasi masyarakat dalam Pilgub dan Pilwali :

Tabel 3
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILU PRESIDEN
DI KOTA MOJOKERTO

NO	TAHUN	JUMLAH PEMILIH (DPT)	TINGKAT KEHADIRAN		PROSENTA SI PARMAS
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	
1	2004 (Put. I)	83.665	69.391	1.575	84,82%
2	(Put. II)	83.574	67.337	1.914	82,86%

² Data KPU Mojokerto 2014 (Ket:Tidak Dipublikasikan)

3	2009	89.4429	65.984	3.689	76,72%
4	2014	94.528	74.210	1.122	81,66%

Tabel 4

**PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILKADA
DI KOTA MOJOKERTO**

NO	TAH UN	JUMLAH PEMILIH (DPT)	TINGKAT KEHADIRAN		JUMLAH PASLON		PROSEN TASI PARMAS
			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	PARPOL	PERSEO RANGAN	
1.	2008	88.003	64.742	1.751	4	-	74,98%
2.	2013	93.737	72.842	3.462	4	2	81,40%

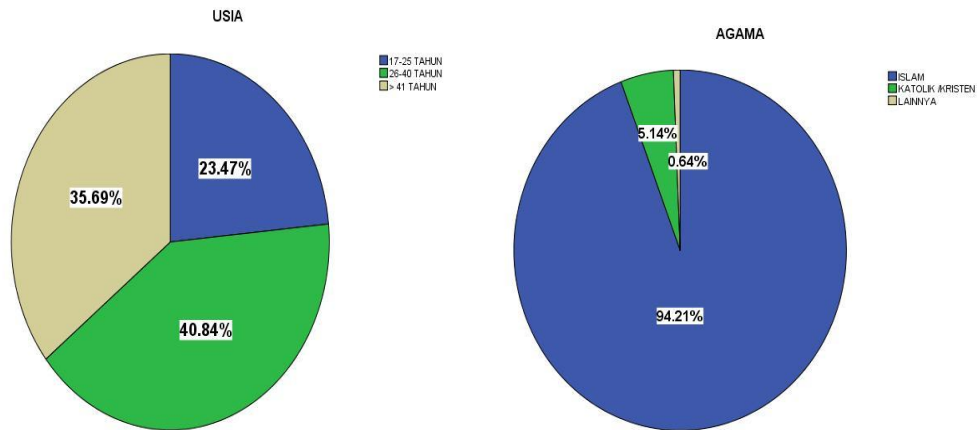
3. Gambaran Sampel Penelitian

Sampel penelitian dipilih secara acak berdasarkan tingkatan usia. Karena jumlah Kecamatan hanya dua, yakni Magersari dan Prajurit Kulon, maka jumlah sampel dianggap mewakili keseluruhan populasi penelitian.

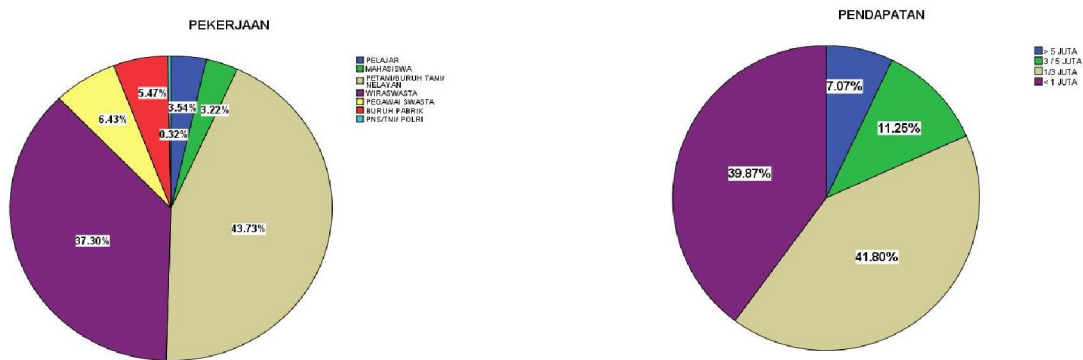
Terdapat 311 sampel penelitian yang mewakili usia produktif dan memiliki hak pilih. Sampel dipilih secara berjenjang yang mewakili dua kecamatan, dan mewakili 50 % Kelurahan/desa. Dengan perincian sampel yang berusia 17-25 tahun (23,47 %), yang berusia 26-40 tahun (40, 84 %) dan yang berusia di atas 41 tahun sebesar 35,69 %. Dengan perincian 57, 23 % sampel laki-laki dan 42, 27 % sampel perempuan. Gambaran sampel di atas menunjukkan bahwa sampel yang sudah pernah mengikuti Pemilu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sampel pemilih pemula.

Status keluarga meliputi sampel yang sudah menikah sebanyak 69, 77 %, janda atau duda 4,82 % dan yang masih bujang atau single 25,40 %. Sementara sampel berdasarkan latar belakang agama, sampel muslim sebanyak 94,21 %, Katholik/Kristen 5,14 % dan agama selain keduanya 0,64 %.

Berikut ini adalah sampel penelitian berdasarkan status keluarga dan agama :



Sementara, latar belakang sampel penelitian berdasarkan pekerjaan adalah pelajar dan mahasiswa 9 %, tani dan buruh tani 6,43 %, buruh pabrik 5,47 %, pegawai swasta 43,73 % dan wiraswasta 37, 39 %. Sedangkan sampel berdasarkan pendapatan dengan rincian yang di bawah 1 juta sebanyak 39,87 %, pendatan antara 1-3 juta 41,80 %, pendapatan antara 3-5 juta 11,26 % dan yang diatas 5 juta sebesar 7,07 %.



Dari sisi latar belakang pendidikan sampel penelitian, yang tamat SD/MI 6,75 %, pendidikan SMP/MTs 11,58 %, SMA sederajat 53 % dan Perguruan Tinggi 28, 62 %. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah responden berlatar belakang sekolah menengah atas.

B. Pengetahuan dan Melek Politik Masyarakat

1. Pengetahuan tentang Pemilu

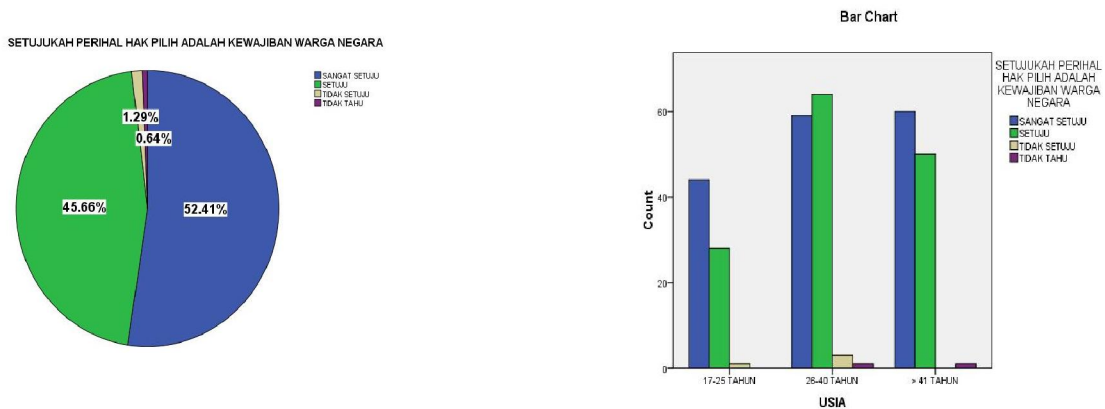
a. Pemilu sebagai kewajiban warga Negara

Sebagian besar sampel penelitian sudah menggunakan hak pilih, yakni sebesar 95, 50 %. Sementara yang belum menggunakan hak pilih hanya 4, 50 %. Namun demikian, sampel tersebut tidak menggambarkan keseluruhan dari Pemilu yang dilaksanakan di Kota Mojokerto. Karena yang ditanyakan sudah pernah ikut atau tidak, bukan pada kasus-kasus tertentu seperti Pileg, Pilpres atau Pilkada. Sangat mungkin tidak semua responden pernah mengikuti Pemilu, Cuma sudah punya pengalaman mencoblos.

Tentang pandangan bahwa Pemilu merupakan kewajiban setiap warga negara, 52,41 % menyatakan sangat setuju, 45, 66 % menyatakan setuju, hanya 1,5 % yang menyatakan tidak setuju.

Namun ada perbedaan pandangan berdasarkan latar belakang responden. Dari aspek jenis kelamin, kaum laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan tentang pandangan kewajiban mengikuti Pemilu. Demikian pula faktor usia. Usia produktif 26-40 tahun jauh lebih tinggi dibandingkan pernyataan dari usia 41 tahun ke atas, demikian pula usia 17-25 tahun.

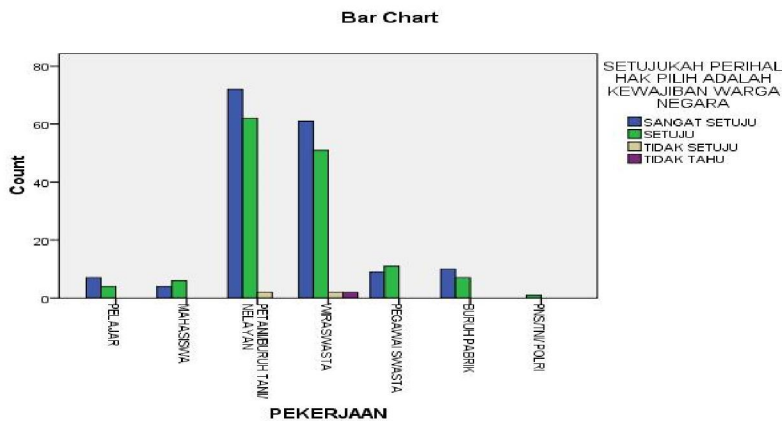
Berikut ini adalah gambaran pandangan Pemilu sebagai kewajiban warga Negara :



Data tersebut sekaligus menunjukkan bahwa tingkat kematangan seseorang memberikan andil terhadap pandangan Pemilu sebagai kewajiban setiap warga Negara.

Sementara berdasarkan latar belakang pekerjaan, pandangan petani/buruh tani lebih tinggi dibandingkan dengan profesi lainnya, meskipun sampel petani/buruh tani jauh lebih kecil dibandingkan dengan sampel buruh dan wiraswasta. Sementara karyawan/pegawai swasta dengan jumlah sampel cukup besar justru yang menganggap Pemilu merupakan kewajiban warga Negara sangat kecil.

Berikut ini adalah gambaran pandangan masyarakat berdasarkan latar belakang pekerjaan :

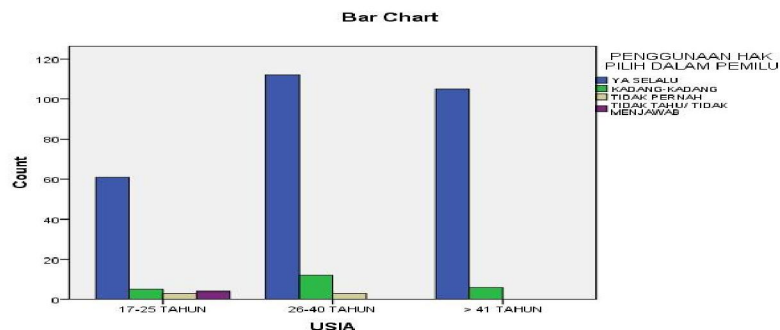


b. Urgensi Pemilu

Berbedasarkan pandangan masyarakat, bahwa semua jenis Pemilu dianggap penting untuk berpartisipasi, yakni; (1) Pemilihan Legislatif, (2) Pemilihan DPD, (3) Pilpres, (4) Pemilihan Gubernur dan (5) Pemilihan Bupati/Wali Kota. 88, 75 % menyatakan bahwa semua Pemilu di atas dianggap penting untuk diikuti dalam rangka untuk merubah keadaan. Hanya 5,14 % yang menganggap Pilkada (Wali Kota/Wakil Wali Kota) lebih penting dari pada Pemilu yang lain.

Yang cukup dominan pandangan tersebut dari kalangan tua yang berumur di atas 41 tahun. Pilihan warga berumur muda lebih muda juga sama, namun sebagian yang memilih hanya Pemilukada yang dianggap lebih penting justru dari kaum muda, yang berumur 17-25 tahun.

Berikut ini data statistik sikap respondon terhadap urgensi Pemilu :



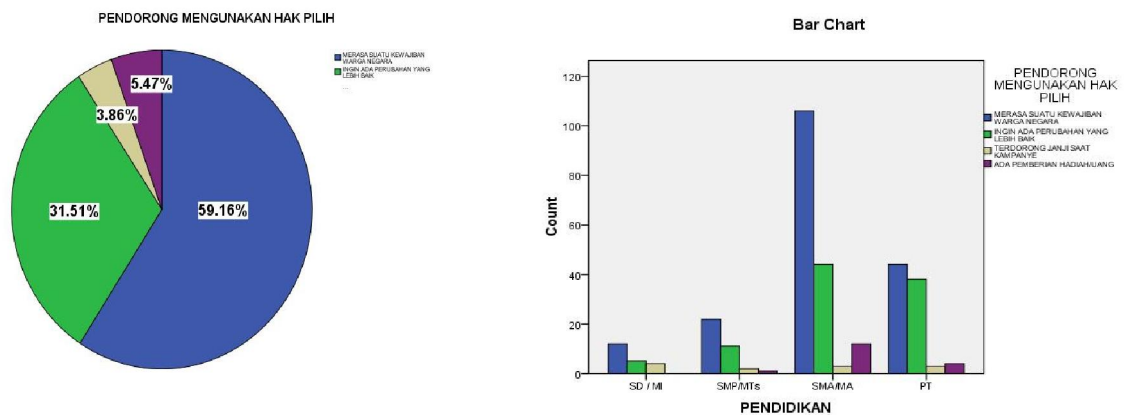
c. Faktor pendorong dalam berpartisipasi dalam Pemilu

Sementara yang mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilih karena merupakan suatu kewajiban sebagai warga Negara (59,16%), karena adanya keinginan perubahan yang lebih baik (31,51%). Sementara karena faktor janji saat kampanye cukup kecil, demikian pula karena faktor pemberian hadiah (money politic) pada saat menjelang pencoblosan, yang berada di kisaran 5,47% dan 3,86%.

Dilihat dari sisi latar belakang pendidikan, masyarakat yang berlatar belakang pendidikan SMA sederajat lebih tinggi dibandingkan dengan latar belakang pendidikan yang lain. Sementara yang memilih pemimpin karena janji atau pemberian hadiah yang cukup menonjol dari masyarakat yang berlatar belakang pendidikan SMP/MTs atau SD/MI.

Kondisi di atas berbanding lurus dengan latar belakang penghasilan. Dimana yang yang berlatar belakang penghasilan rendah justru mendominasi alasan memilih karena faktor janji atau pemberian hadiah saat kampanye. Meskipun jumlahnya tidak dominan, dapat dapat digambarkan bahwa faktor penghasilan atau motif ekonomi menjadi salah penentu dalam mendorong masyarakat terlibat dalam Pemilu.

Berikut ini adalah gambaran grafik :

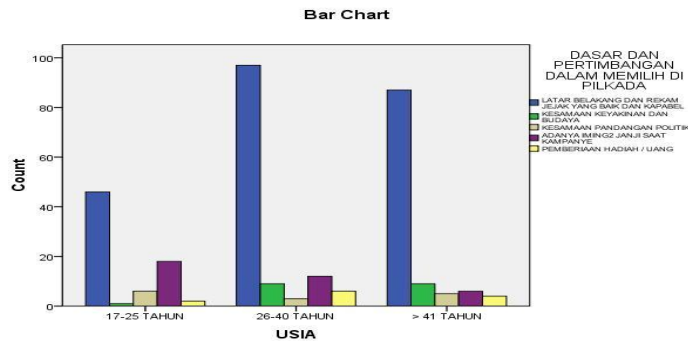


Sementara itu dasar dan pertimbangan dalam memilih cukup variatif. Sebagian besar karena sudah mengenal latar belakang dan rekam jejak calon (73,95%), memilih karena kesamaan keyakinan dan budaya (6,11%), karena kesamaan pandangan politik (4,50%) dan karena iming-iming atau janji saat

kampanye. Sementara yang memilih karena faktor pemeberian hadiah atau politik uang cukup kecil, yakni 3,86 %.

Yang menarik adalah angka tertinggi yang memilih karena faktor janji atau iming-iming pada saat kampaye terjadi pada usia muda atau pemilih pemula antara 17-25 tahun, sementara pemilih tua atau di atas 41 tahun dengan kondisi sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa janji pada saat kampnye memperoleh respon yang tinggi dari kalangan pemilih pemula atau usia muda yang menginginkan perubahan yang lebih baik.

Berikut ini adalah gambaran grafik dasar dan pertimbangan dalam memilih calon pemimpin dilihat dari sisi usia :

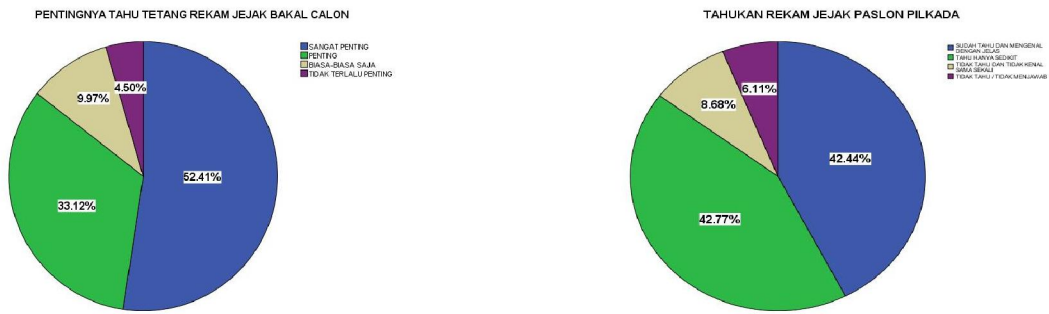


2. Pengetahuan tentang Calon yang dipilih dalam Pemilu

Masyarakat Kota Mojokerto dalam menentukan pilihan sudah mengenal calon yang akan dipilih, terutama yang dominan calon Wali Kota dan Wakil Walikota. Dalam riset tergambar bahwa masyarakat sudah mengenal baik calon yang akan dipilih mencapai 42, 44 %, mengenal namun hanya sedikit 42, 77 %, tidak tahu dan tidak kenal sama sekali sebanyak 8, 68 % dan tidak menjawab (tidak paham persoalan) sebanyak 6, 11 %.

Kondisi di atas juga berbanding lurus tentang pentingnya mengetahui pasangan calon yang akan dipilih. Dimana 52, 41 % menyatakan sangat penting mengetahui rekam jeka calon dan 33 % menyatakan penting. Sementara yang menyatakan tidak penting hanyalah 9, 97 %.

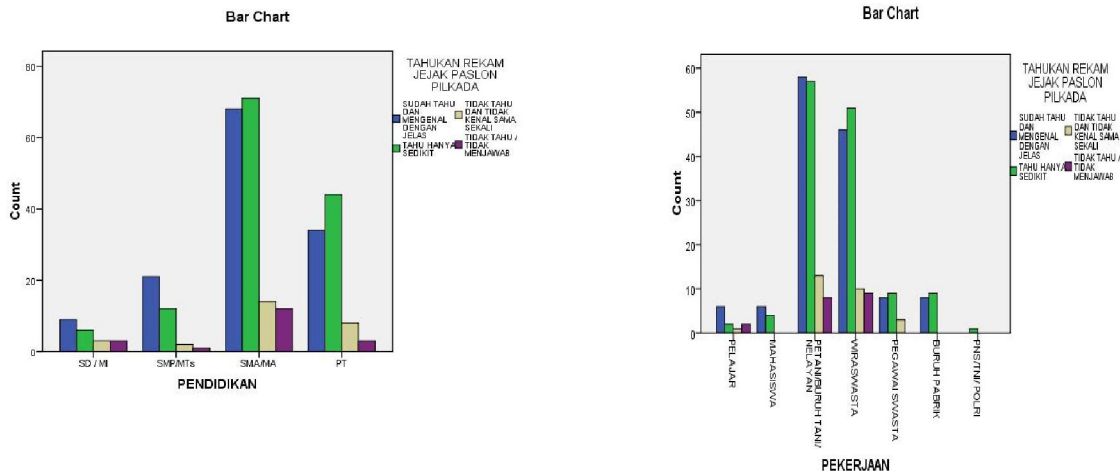
Berikut adalah gambaran pengetahuan masyarakat tentang calon yang akan dipilih dalam Pemilu, terutama Pilkada :



Pengetahuan tentang pasangan Calon, didominasi oleh kalangan tua atau yang sudah mengenyam pendidikan SMA ke atas, sementara yang berpendidikan SD dan SMP sangat rendah. Hal yang sama juga terjadi pada masyarakat yang berlatar pendidikan tinggi, di mana mereka sudah mengenal lebih baik tentang calon pemimpin yang akan dipilih.

Hal yang cukup kontraproduktif apabila dilihat dari latar belakang pekerjaan. Dimana tingkat pengetahuan dari latar belakang pelajar dan mahasiswa sangat rendah dibandingkan dengan pengetahuan yang berlatar belakang petani dan karyawan swasta. Sesuatu yang seharusnya terjadi tingkat pengetahuan pelajar dan mahasiswa seyogyanya lebih tinggi.

Berikut ini adalah gambaran pengetahuan tentang calon yang akan dipilih berdasarkan latar belakang pendidikan dan pekerjaan :



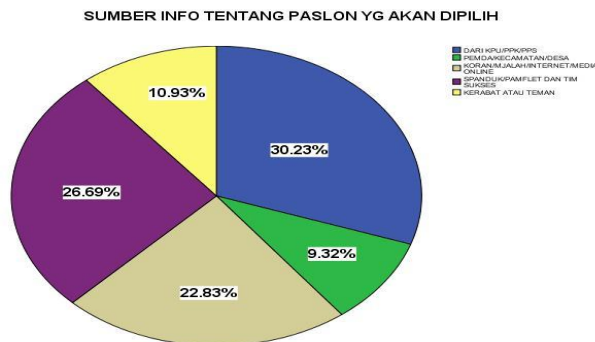
Hasil data di atas menggambarkan bahwa latar belakang pendidikan tidak berbanding lurus dengan tingkat pengetahuan tentang calon pemimpin yang akan

dipilih. Demikian pula, latar belakang pekerjaan yang mapan tidak selalu identik dengan pengenalan dan pengetahuan tentang calon yang akan dipilih.

Sumber informasi pasangan calon. Sumber informasi tentang calon yang diperoleh oleh masyarakat cukup beragam, dan tidak ada yang menonjol. Misalnya sumber dari KPU/PPK/PPS mencapai 30, 23 %, dan sumber spanduk dan pamflet mencapai 26, 69 %. Sementara sumber dari pemerintah (Pemkot, Kecamatan dan Desa) mencapai 9, 32 % dan pasangat calon 10, 93 %. Justru informasi yang bersumber dari teman cukup menonjol hingga 22, 83 %.

Yang patut disimak bahwa sumber dari media cetak dan elektronik yang cukup rendah, yang hanya 10, 93 %. Padahal media tersebut dianggap sebagai sarana utama karena sudah terakses dengan mudah oleh masyarakat. Sisi lain, penggunaan ipod, netbook, gadget cukup mewabah di masyarakat, namun tidak banyak dipergunakan untuk kepentingan pengenalan atau mengetahui calon pemimpin yang akan dipilih. Justru sebaliknya, masyarakat banyak menggunakan media tradisional seperti spanduk, pamphlet atau diskusi bersama teman untuk mengenal calon pemimpin yang akan dipilih.

Berikut ini adalah gambaran sumber informasi calon yang akan dipilih :

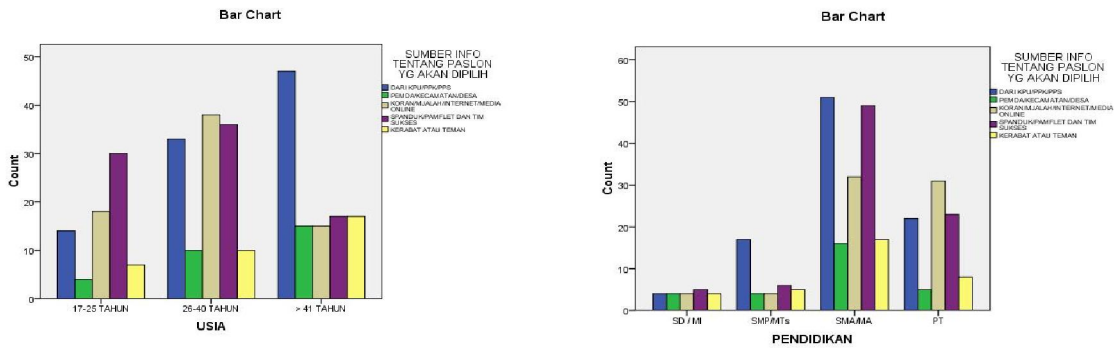


Sementara itu berdasarkan usia, yang banyak menggunakan sumber dari media cetak maupun media sosial adalah dari kalangan muda, yakni yang berumur di bawah 40 tahun. Begitu pula pengenalan calon lewat media kampanye. Sementara masyarakat yang berumur di atas 40 tahun lebih banyak mengetahui dari KPU/PPK/PPS, di mana mereka dapat berinteraksi secara langsung di keluarahan atau desa dimana mereka tinggal.

Pengetahuan tentang calon berdasarkan latar belakang menunjukkan bahwa, penggunaan media cetak dan elektronik banyak didominasi oleh kalangan

berlatar belakang pendidikan SMA ke atas. Sementara yang berlatar pendidikan SD dan SMP cukup kecil

Berikut ini adalah gambaran sumber informasi pengenalan calon berdasarkan latar belakang umur dan pendidikan :



3. Tata cara mencoblos

Masyarakat Kota Mojokerto sebagian besar sudah paham tata cara mencoblos. Hanya sebagian kecil yang tidak tahu. Yang menyatakan sudah paham cara mencoblos 94 %, sementara sisanya yang 6 % ada kalanya paham/tidak, dan hanya sebagian kecil saja yang tidak tahu. Dilihat dari latar belakang pendidikan, usia dan pekerjaan, kesepahaman cara mencoblos merata di semua latar belakang tadi. Bahkan yang berpendidikan terendah pun juga memahami cara mencoblos. Demikian pula bagi pemilih pemula, yang masih duduk di bangku sekolah atau perguruan tinggi.

Mencoblos di TPS memang sudah terbiasa bagi masyarakat Indonesia. Momen *coblosan* bukan sekedar pada saat Pemilu, tetapi pada saat pemilihan RT, RW, Kepala Desa atau dalam organisasi juga melaksanakan kegiatan dan cara yang sama dengan Pemilu. Karenanya tidak mengherankan jika masyarakat sudah memahami cara-cara tersebut. Demikian pula yang terjadi pada kalangan pelajar dan mahasiswa. Di mana kegiatan *coblosan* juga terbiasa dihadapi oleh mereka.

C. Refleksi Temuan Penelitian

Dalam teori Pemilu, angka partisipasi diukur dari sejauh mana masyarakat memahami tentang makna dan arti penting Pemilu dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara. Pemilu merupakan instrumen legal untuk menyusun kebijakan melalui suksesi dan representasi masyarakat lewat wakil-wakilnya, terutama di DPR/MPR. Melalui Pemilu hak-hak politik rakyat dapat tersalurkan secara legal dan formal.

Dalam alam demokrasi, keberadaan Pemilu merupakan suatu yang bersifat mutlak. Tidak ada instrumen lain yang dapat mewakili keterwakilan hak-hak politik rakyat selain melalui Pemilu. Penjaminan atas hak-hak politik itu merupakan sesuatu yang terintegral dalam alam demokrasi yang bersifat legal. Apapun namanya sebuah institusi negara, begitu pula apapun bentuknya konstitusi tersebut, Pemilu merupakan satu-satunya cara yang sah.

Untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas, salah satu indikatornya ditandai dengan angka partisipasi yang tinggi masyarakat untuk menentukan hak politiknya. Namun bukan berarti, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka semakin berkualitas demokrasi suatu negara. Begitu pula sebaliknya, jika angka partisipasi rendah, tidak serta merta dikatakan demokrasinya tidak berkualitas. Karena tidak ada dalam teori-teori Pemilu yang menyatakan sedemikian itu. Bahwa wujud representasi ditandai dengan partisipasi, merupakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Karena semakin tinggi angka partisipasi, maka hak-hak politik masyarakat dengan sendirinya terwadahi dengan baik.

Untuk mewujudkan angka partisipasi yang tinggi, maka tidak cukup dengan hanya penyadaran maupun tekanan (*pressing group*) untuk memobilisasi massa agar datang ke tempat-tempat pemilihan pada saat Pemilu. Datang ke arena pencoblosan merupakan hak bagi tiap warga negara, begitu pula tidak menghadiri alian Golput juga hak setiap orang. Karena tidak ada satu pun yang bisa memaksa atau terpaksa dalam menentukan hak pilihnya pada saat Pemilu. Demikian pula, menjadi hak warga negara untuk menentukan siapa dan partai apa yang akan dipilih.

Karena tidak adanya paksaan itulah, maka pemahaman terhadap arti pentingnya Pemilu merupakan suatu keniscayaan. Di Indonesia, pemahaman terhadap arti pentingnya Pemilu sudah ditanamkan sejak dini, melalui pendidikan yang terstruktur dari jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.

Sebelum Era Reformasi, kita mengenal mata pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila) yang merupakan mata pelajaran wajib di setiap jenjang pendidikan hingga SMA. Sementara di Perguruan Tinggi ada mata kuliah Pancasila, yang wajib diprogram oleh setiap mahasiswa. Pada Era Reformasi, mata pelajaran dan mata kuliah tersebut dirubah menjadi PPKn (Pendidikan Kewarganegaraan), atau

di beberapa PT dikenal dengan Civic Education. Mata pelajaran/mata kuliah tersebut salah satunya memuat arti pentingnya demokrasi bagi suatu negara, serta menjelaskan posisi Pemilu dalam negara demokrasi modern.

Dalam konteks praktis, tugas menjelaskan atau pendidikan politik menjadi tanggung jawab negara. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk melakukan pendidikan politik. Kewajiban tersebut juga menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang berfungsi sebagai regulator dan operator penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Pertanyaan selanjutnya, apakah dengan pendidikan politik yang baik akan berdampak pada angka partisipasi dalam Pemilu? Apakah masyarakat modern, maju dan berperadaban tinggi dengan serta merta berdampak pada angka partisipasi politik? Pertanyaan tersebut menjadi salah satu isu utama dalam temuan penelitian ini.

Apa yang terjadi di Kota Mojokerto merupakan kenyataan lain. Meskipun tingkat pengetahuan masyarakat tentang arti penting Pemilu dan dampaknya bagi kelangsungan negara sangat baik dan sangat tinggi, namun hal tersebut tidak serta merta ditandai dengan angka partisipasi yang tinggi. Angka partisipasi dalam momentum Pemilu semakin lama semakin mengalami penurunan. Meskipun berada di atas rata-rata nasional, namun marginnya tidak terlalu signifikan. Sejak Pemilu Legislatif 2004, 2009, 2014 mengalami tren penurunan. Begitu pula yang terjadi pada Pemilihan Presiden, Gubernur dan Walikota.

Bukti lain yang juga penting untuk mendapatkan porsi perhatian adalah tentang pengetahuan politik kalangan pelajar dan mahasiswa (terutama pemilih pemula) yang berada di bawah karyawan swasta, buruh dan petani. Baik pengetahuan tentang Pemilu, pengetahuan tentang calon, dan pemahaman menyeluruh terhadap arti pentingnya politik masih cukup memprihatinkan.

Yang hendak direfleksikan lebih lanjut adalah ternyata tingkat pendidikan tidak serta merta memberikan pengaruh terhadap angka partisipasi dalam pemilu. Kaum pelajar dan mahasiswa yang masih segar pengetahuan dan cara berfikir yang kritis tidak berbanding lurus dengan keinginan kuat untuk menentukan perubahan kebijakan melalui Pemilu. Justru yang berlatar belakang pendidikan SMA dan para kaum buruh dan karyawan swasta yang lebih aktif dalam setiap momen Pemilu.

Dalam konteks inilah, pendidikan politik tidak cukup diserahkan kepada lembaga pendidikan formal. Pendidikan politik harus dimaknai secara luas dan perlu ada pelibatan semua pihak yang memiliki ruang terbuka untuk melakukan

sosialisasi politik, semisal LSM, Ormas, OKP, Pesantren, masjid, musholla, bahkan lembaga pengajian (majlis ta'lim).

Hal tersebut menjadi tantangan sendiri bagi regulatur dan operator Pemilu, semisal KPU/PPK hingga PPS. Peran strategis mereka melalui inovasi-inovasi baru terus diperlukan untuk memperkuat pendidikan politik.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Pengetahuan tentang pemilu
 - a. *Pengetahuan tentang Pemilu.* Pengetahuan masyarakat Kota Mojokerto tentang Pemilu masuk dalam katagori baik dan sangat baik atau tinggi dan sangat tinggi. 97 % masyarakat memandang bahwa mengikuti Pemilu merupakan kewajiban setiap warga Negara, sehingga perhatian dalam memberikan hak pilih merupakan prioritas pada saat Pemilihan Umum. Demikian pula 88 % masyarakat menganggap semua Pemilu, baik Pileg, Pilpres, Pilgub dan Pilwali dianggap penting karena akan berdampak pada perubahan kebijakan. Namun dari semua Pemilu, Pilwali menempati urutan tertinggi.
 - b. *Pengetahuan tentang Calon yang akan dipilih.* Pengetahuan masyarakat tentang calon yang akan dipilih juga baik/tinggi. 85 % masyarakat Kota Mojokerto menganggap sangat penting dan penting mengenal calon yang dipilih. Sementara hanya 14 % yang menganggap tidak penting. Hal yang sama juga terjadi pada pengetahuan tentang rekam jejak (track record) para calon. Dimana 85 % sudah tahu tentang latar belakang calon meskipun sedikit, sementara hanya 14 % yang tidak mengetahui sama sekali. Sumber pengetahuan tentang calon dan tata cara pemilihan tertinggi berasal dari KPU/PPK/PPS sebanyak 30 %, spanduk, Baliho, pamphlet 26, 69 %, dari media cetak dan elektronik 22,83 %, dari kerabat dan teman 11 % dan dari pemerintah hanya 9 %. Sementara dasar utama dalam menentukan pilihan karena sudah tahu rekam jejak dan kapabilitas calon (74 %), karena berharap pada janji saat kampanye (11,58 %), dan hanya 5 % memilih karena factor pemberian hadiah atau *money politic*.
 - c. *Pengetahuan tentang cara mencoblos.* Pengetahuan masyarakat tentang tata cara mencoblos cukup tinggi/baik yang mencapai 86 %, selebihnya merasa bingung dan tidak tahu.
2. Dua kecamatan, yakni Magersari dan Prajurit Kulon memilih tipikal pengetahuan yang sama. Tidak ada perbedaan yang menonjol pengetahuan mereka tentang Pemilu.
3. Meskipun memiliki pengetahuan yang cukup baik, namun ada perbedaan yang cukup tajam antara pengetahuan masyarakat karena latar belakang umur, pendidikan dan pekerjaan. Pengetahuan yang sangat tinggi berasal dari penduduk yang berumur di atas 25 tahun.

Yang cukup mengenal tata cara Pemilu hingga latar belakang calon yang akan dipilih dari masyarakat yang berpendidikan SMA ke atas. Sementara yang berpendidikan SD/MI atau SMP/MTs masih jauh dibandingkan dengan yang berpendidikan di atasnya. Hal yang berbeda juga dapat ditemui pada latar belakang pekerjaan. Dimana latar pekerjaan swasta, buruh, karyawan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang berlatar belakang pelajar dan mahasiswa. Kalangan pelajar dan mahasiswa tidak serta merta memiliki pengetahuan yang baik tentang Pemilu, Calon yang akan dipilih dan tata cara mencoblos.

B. Rekomendasi

Berdasarkan temuan hasil penelitian di atas, maka direkomendasikan sebagai berikut :

1. Kepada KPU/PPK/PPS.
 - a. Kepada KPU/PPK/PPS. Untuk meningkatkan pengetahuan politik dan angka partisipasi, maka perlu meningkatkan sosialisasi Pemilu pada level masyarakat yang berpendidikan SMP ke bawah. Karena pada kenyataannya, sebagian besar mereka tidak banyak mengenal urgensi Pemilu dan calon yang dicoblos/dipilih.
 - b. Kepada KPU/PPK/PPS. Untuk meningkatkan sosialisasi pada pemilih pemula, terutama pelajar dan mahasiswa. Karena keterpelajaran tidak serta merta berbanding lurus dengan pengetahuan mereka tentang pemilu dan calon yang akan dipilih. Hal yang sama juga perlu dilakukan pada pemilih perempuan.
 - c. Kepada KPU/PPK/PPS. Perlu variasi dalam sosialisasi tentang Pemilu terutama Pilkada. Perlu dilakukan kerjasama dengan Ormas, OKP, LSM, Pesantren, lembaga pendidikan, perusahaan untuk melakukan pendidikan politik masyarakat.
2. Kepada Pemkot/Kecamatan/Desa/Kelurahan
Agar membangun sinergi dengan KPU/PPK/PPS dalam meningkatkan pengetahuan politik dan partisipasi terutama bagi kalangan pemilih pemula, masyarakat yang berpendidikan SMP ke bawah dan kaum perempuan. Meskipun disparitas pengetahuan tentang Pemilu tidak terlalu tajam, namun yang terjadi di Kota Mojokerto cukup mencolok.

DAFTAR PUSTAKA

- Asfar, Muhammad, *Pemilu dan Prilaku Pemilih 1955-2004*. Surabaya:Pustaka Ureka dan PusdeHAM, 2006
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2007
- Chalik, Abdul, *NU dan Geopolitik;Perubahan dan Kesenambungan*. Yogyakarta:IMPULSE, 2011
- ., *Geopolitik*. Surabaya:UINSA, 2014
- Cole, Stephen, *The Sociological Method:An Introduction to The Science of Sociology* Chicago:RandMcNally Company, 1980
- Dahl, Robert A., *Modern Political Analysis*. New Delhi:Prentice-Hall of India Limited, 1979
- Duverger, Maurice, *Sosiologi Politik*, ter. Daniel Dhakidae. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Hikam, Muhammad AS, *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta:LP3ES, 1996
- Haris, Syamsuddin (ed.), *Pemilihan Langsung di Tengah Oligarki Partai;Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Michael Rush, Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, ter. Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Saiful Mujani, R. William Liddle, Kuskrido Ambardi, *Kuasa rakyat*. Jakarta:Mizan, 2011
- A. Almond, Gabriel, Sydney Verba, *Budaya Politik:Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, ter. Jakarta:Bumi Aksara, 1990
- Alfian dan Nazarudin Syamsuddin (ed.), *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta:Gramedia, 1991
- Kartono, Kartini. (1990) *Wawasan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Penerbit CV Mandar Maju.
- Kantaprawira, Rusadi. (2004) *Sistem Polilik Indonesia: Suatu Model Pengantar* Bandung: Sinar Baru Algensindo

Sirozi, Muhammad. (2005) *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Politik Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Surbakti, Ramlan. (1999) *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

No. Data

Kode Data

**ANGKET SURVEY TINGKAT PENGETAHUAN POLITIK MASYARAKAT TENTANG PEMILIHAN UMUM
DI INDONESIA**

A. Data Responden

1. Nama :
2. Alamat :
3. Jenis kelamin
 - a. Laki-Laki
 - b. Perempuan
4. Status keluarga
 - a. Menikah
 - b. Janda/Duda
 - c. Single
5. Usia
 - a. 17-25 tahun
 - b. 26-40 tahun
 - c. > 41 tahun
6. Pendidikan
 - a. SD/MI
 - b. SMP/Mts
 - c. SMA/MA
 - d. PT
7. Pekerjaan :
 - a. Petani/Buruh tani
 - b. Nelayan
 - c. Wiraswasta/pedagang
 - d. Pegawai Swasta
 - e. Buruh Pabrik
 - f. PNS/TNI/POLRI
 - g. Tidak bekerja
8. Rata-rata Pendapatan Perbulan:
 - a. >5 juta
 - b. 3 s/d 5 juta
 - c. 1 s/d 3 juta
 - d. < 1 juta
9. Agama :
 - a. Islam
 - b. Katolik/Kristen
 - c.
10. Tempat tinggal
 - a. Desa Perkampungan
 - b. Kota perkampungan
 - c. Desa Perumahan
 - d. Kota perumahan

B. Pertanyaan

1. Apakah anda sudah pernah menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu), baik dalam Pileg, Pemilihan DPD, Pilpres dan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)
 - a. Sudah
 - b. Belum
2. Jika anda sudah pernah, apa yang mendorong anda untuk meluangkan waktu hadir dan menggunakan hak pilih?
 - a. Karena merasa suatu kewajiban warga Negara
 - b. Karena ingin ada perubahan yang lebih baik
 - c. Karena terdorong oleh janji-janji pada saat kampanye
 - d. Karena ada pemberian hadiah/uang
3. Setujukah saudara bahwa menggunakan hak pilih dalam Pemilu merupakan kewajiban warga Negara yang baik
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak setuju

- d. Tidak tahu
4. Dimanakah di antara Pemilu di Indonesia yang paling penting bagi saudara, yakni; (1) Pemilihan Legislatif, (2) Pemilihan DPD, (3) Pilpres, (4) Pemilihan Gubernur dan (5) Pemilihan Bupati/Wali Kota?
 - a. Kelima Pemilu tersebut sama-sama penting
 - b. Pemilihan Legislatif, Pemilihan DPD, Pilpres saja yang dianggap penting
 - c. Pemilihan Gubernur dan Bupati/Wali Kota saja yang dianggap penting
 - d. Pemilihan Bupati/Wali Kota saja yang dianggap penting
 5. Sebelum anda menentukan pilihan (mencoblos), apakah saudara sudah tahu rekam jejak calon yang akan anda pilih?
 - a. Sudah tahu dan mengenal dengan jelas
 - b. Mengetahui tapi hanya sedikit
 - c. Tidak tahu dan tidak mengenal sama sekali
 - d. Tidak tahu/Tidak menjawab
 6. Jika anda sudah mengetahui, dari manakah sumber informasi pengetahuan anda tentang calon yang anda pilih
 - a. Dari KPU/PPK/PPS
 - b. Dari Pemerintah Daerah/Kecamatan/Desa
 - c. Dari Koran/majalah/Internet/Media Online
 - d. Dari spanduk/pamflet dan tim sukses
 - e. Dari kerabat atau teman
 7. Apakah anda menganggap penting mengetahui rekam jejak bakal calon sebelum anda menentukan pilihan
 - a. Sangat penting
 - b. Penting
 - c. Biasa-biasa saja
 - d. Tidak terlalu penting
 8. Dalam menentukan pilihan dalam setiap Pemilu, apa yang menjadi dasar dan pertimbangan utama (pilih yang paling dominan)
 - a. Karena latar belakang dan rekam jejak calon yang baik dan kapabel
 - b. Karena kesamaan keyakinan dan budaya
 - c. Karena kesamaan pandangan politik
 - d. Karena adanya iming-iming janji pada saat kampanye
 - e. Karena pemberian hadiah/uang
 9. Apakah anda selalu menggunakan hak pilih (mencoblos) dalam setiap momen Pemilu, baik Pileg, Pilpres, Pemilihan DPD, Pemilihan Gubernur dan Bupati/Wali Kota
 - a. Ya selalu
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
 - d. Tidak tahu/tidak menjawab
 10. Apakah anda sudah mengetahui cara mencoblos yang benar sesuai dengan tata cara yang dikeluarkan oleh KPU
 - a. Ya selalu
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
 - d. Tidak tahu/tidak menjawab